



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKALPINANG

KOMPLEK PERKANTORAN PEMPROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
JALAN PROFESI NOMOR 4 PANGKALPINANG 33149
TELEPON (0717) 434756, FAKSIMILE (0717) 4262434
LAMAM www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK op.skipmpangkalpinang@kkp.go.id

Nomor : B.709/SKIPM.PKP/TU.210/VII/2024

Pangkalpinang, 01 Juli 2024

Lampiran : -

Hal : Laporan SPIP Triwulan II 2024

Yth. 1. Kepala BPPMHKP
2. Ketua Satgas SPIP Eselon I BPPMHKP

di-

Jakarta

Merujuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bersama ini kami sampaikan penyelenggaraan SPIP BPPMHKP Bangka Belitung pada Triwulan Kedua Tahun 2024 sebagai berikut:

I. Kelembagaan

Tim SPIP Satuan Kerja telah dibentuk dan telah ditetapkan pada Surat Tugas Tim SPIP Satuan Kerja Sekretariat BPPMHKP Bangka Belitung Nomor B.18/SKIPM.PKP/OT.210/II/2024 tanggal 03 Januari 2024, sampai dengan pelaporan mengalami perubahan dikarenakan adanya perpindahan beberapa orang pegawai jabatan fungsional Pengendali Hama Penyakit Ikan ke Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bangka Belitung.

II. Pelaksanaan Pengendalian

Penyelenggaraan SPIP Satuan Kerja Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Bangka Belitung pada Triwulan Kedua Tahun 2024, dilaksanakan melalui 3 (tiga) jenis pengendalian, meliputi:

a. Pengendalian Rutin

Pengendalian rutin diselenggarakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai setiap harinya. Kegiatan mingguan akan dievaluasi di setiap awal minggu pada waktu pelaksanaan apel pagi hari Senin atau rapat bulanan. Risiko yang perlu

dikendalikan dalam penyelenggaraan pengendalian rutin antara lain dalam aspek organisasi, aspek perencanaan, aspek pengelolaan keuangan (pelaksanaan anggaran, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), akuntansi dan pelaporan, serta kerugian negara), aspek kepegawaian, dan aspek kinerja. Adapun Satker BPPMHKP Bangka Belitung pada Triwulan Kedua Tahun 2024 telah melaksanakan pengendalian rutin sebagai berikut:

Pengendalian	Kondisi	Kegiatan	
		Jumlah	Pelaksanaan kegiatan
Organisasi	(Ada)	12	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dan Pelaksanaan Organisasi dengan Kepala Badan dan Eselon Lainnya
Perencanaan	(Ada)	8	Koordinasi Penyusunan Program dan Anggaran, Review Kegiatan
Keuangan Negara	(Ada)	12	Manajemen Resiko, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, Rekonsiliasi PNBP Bulanan
Kepegawaian	(Ada)	6	Monitoring kepegawaian termasuk update di aplikasi e-pegawai oleh Pj kepegawaian
Kinerja	(Ada)	12	Monitoring Kegiatan Harian oleh Tim Kerja setiap awal minggu, Jadwal Palang Kegiatan, Rapat Bulanan oleh Kepala UPT

b. Pengendalian Berkala

Pengendalian berkala merupakan sarana penyampaian informasi aktual mengenai kondisi beberapa aktivitas/kegiatan kepada Pimpinan Kepala Satuan Kerja sebagai bahan dalam pengambilan keputusan guna kegiatan pengendalian. Berikut kondisi form pengendalian berkala Satker BPPMHKP Bangka Belitung hingga Triwulan Kedua Tahun 2024 sebagai berikut :

Form Pengendalian berkala	Kondisi Perubahan/ <i>Update</i>	Uraian Perubahan (Update Data) Form Pengendalian
Kapasitas SDM Pengelolaan	(Tidak Ada)	-
Penyusunan	(Ada)	- Revisi anggaran (POK)

Anggaran		
Pengadaan Barang/Jasa	(Tidak Ada)	- Tidak Ada belanja Modal di Triwulan II 2024
Barang Milik Negara	(Ada)	- Proses Perpindahan Aset Ke Balai Karantina HIT Bangka Belitung
Penyelesaian Kerugian Negara	(Tidak Ada)	- Tidak Ada TGR
Penyerapan Anggaran	(Tidak Ada)	

c. Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko

1) Penilaian Risiko

<i>Update form penilaian risiko</i>	Uraian Perubahan
Ada	Manajemen Risiko yang sudah terkendali pada tahun sebelumnya, tidak akan kembali dimasukkan ke dalam Manajemen Risiko tahun berjalan

2) *Update* Peta Risiko

Update Peta Risiko	Jumlah Kegiatan
Rendah	2 Kegiatan
Sedang	10 Kegiatan
Tinggi	2 Kegiatan

III. Kendala dan Masukan

a. Kendala

Terjadinya perubahan Tim Kerja. Sehingga beban kerja pegawai tidak merata. Selain permasalahan itu, tidak ada lagi kendala yang berarti dalam pelaksanaan pengendalian system intern pemerintah pada UPT BPPMHKP Bangka Belitung.

b. Masukan

Diharapkan adanya pemerataan anggota tim kerja, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan masing-masing tim kerja

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala BPPMHKP Bangka Belitung



Dedy Anet Hendriyanto, S.St.Pi., M.Si.